



## BAKN Diminta Periksa Penggunaan Dana Bansos

**JAKARTA** – Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK Negara) mendesak Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) karena rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik. KUAK juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDFT). Selain itu, DPR dan BAKN juga diminta mendesak pemerintah menghentikan alokasi dan penggunaan

dana bansos pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjelang Pemilu 2014. "Berdasarkan data Indonesia Budget Center (IBC), tren alokasi dana hibah dan bansos setiap tahun meningkat menjelang pemilu. Menuju pemilu tahun depan, dana bansos dalam APBN terus bertambah dari tahun ke tahun dan meningkat tajam," ungkap Koordinator Indonesia Parliamentary Center (IPC) Roy Salam di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray

Rangkuti mengatakan, selama ini tidak ada regulasi khusus soal tata kelola dana bansos sehingga rawan disalahgunakan. Peraturan tentang dana hibah dan bansos mengacu pada PP 58/2005, Permendagri 59/2007, dan Permendagri 13/2006, dan Permendagri No 32/2011.

"Instrumen dana bansos di APBD terjadi banyak penyimpangan yang mengarah pada korupsi dan bancakan untuk pemenangan pilkada," ungkap Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti. Dalam laporan yang diserahkan

kan KUAK kepada Ketua BAKN Sumarjati Arjoso dilampirkan juga temuan-temuan bansos dan hibah di kementerian-kementerian. Dalam tujuh tahun terakhir (2007-2013) anggaran bansos dalam APBN telah mencapai Rp 480,66 triliun atau sekitar 8,5% terhadap belanja pemerintah pusat.

Adapun peningkatan tertinggi anggaran bansos terjadi dua tahun menjelang pemilu misalnya jelang Pemilu 2009, anggaran bansos 2008 meningkat 16% dari 2007, serta naik lagi 27,8% pada 2009. "Demikian

pula jelang Pemilu 2014, anggaran bansos 2012 naik 21% dibanding 2011, dan awal 2013 turun 14,4%, namun bertambah pada revisi APBN," tuturnya.

Ketua BAKN Sumarjati Arjoso menilai dana bansos harus dilihat dulu perencanaannya. Di situ ada tumpang tindih dengan kementerian-kementerian bersangkutan. Model bansos seperti sekarang ini sudah tidak tepat sasaran. "Bansos yang sekarang dikorupsi, pengadaan tak sampai. *Nah*, itu yang harus dimonitorium," ungkapnya.

● **mureywidya**